



Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

The Influence of the Human Development Index, Open Unemployment Rate, and Minimum Wage on Poverty Levels in Districts/Cities in Lampung Province

**Andreka Satria Firdaus¹, Intan Nur Hafizdhah², Ola Ernia³, Ernawati⁴,
Alief Rakhman Setyanto⁵**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: andrkstrfrd17@gmail.com¹, intannurhafizdhah20@gmail.com², olaernia676@gmail.com³,
ernawati05037@gmail.com⁴, aliefrakhmansetyanto@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 05-12-2025

Revised : 06-12-2025

Accepted : 08-12-2025

Published : 10-12-2025

Abstract

This study aims to analyze the influence of the Human Development Index (HDI), Open Unemployment Rate (OUR), and Minimum Wage on the poverty level in districts and cities of Lampung Province. The background of this research is the persistent disparity in poverty levels across regions despite improvements in socio-economic indicators such as HDI and annual minimum wage adjustments. The research employed a quantitative approach using secondary panel data sourced from the Central Bureau of Statistics, covering multiple years and 15 regional units. The data were analyzed using panel regression with model selection through Common Effect, Fixed Effect, and Random Effect approaches to determine the most appropriate model. The findings indicate that HDI has a negative and significant effect on poverty, implying that higher human development contributes to poverty reduction. The Open Unemployment Rate shows a positive but insignificant effect, suggesting that unemployment fluctuations do not directly influence poverty levels. Meanwhile, the minimum wage demonstrates a negative and significant effect, showing that wage increases contribute to lowering poverty when effectively implemented. The study concludes that improving human development and optimizing wage policy are essential strategies for reducing poverty in Lampung Province.

Keywords : HDI, minimum wage, poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah Lampung meskipun terjadi peningkatan IPM dan penetapan upah minimum setiap tahunnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk data panel. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pembandingan model Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect untuk memperoleh model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan kualitas manusia berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan, menunjukkan bahwa fluktuasi pengangguran belum sepenuhnya memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan. Sementara itu, upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan upah mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah



penelitian. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas manusia dan kebijakan upah yang efektif dapat menjadi instrumen strategis dalam penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: IPM, Kemiskinan, Upah Minimum

PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi persoalan fundamental dalam pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Lampung, di mana sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, melainkan kondisi multidimensional yang berkaitan dengan kualitas hidup, keterampilan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif. Para penelitian menyatakan bahwa kemiskinan terjadi ketika individu atau kelompok tidak mampu mencapai standar hidup minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraan. Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menurunkan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi dan sosial, tingkat kemiskinan di Lampung masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah, yang menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentunya (Anita et al., 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin besar pula kapasitas penduduk dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kemiskinan, dimana daerah dengan IPM tinggi cenderung mengalami penurunan angka kemiskinan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Namun, pada konteks Provinsi Lampung, peningkatan IPM tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga diperlukan penelitian lebih rinci untuk memahami dinamika tersebut (Rusdi, 2023).

Selain IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu faktor yang diyakini memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Secara teori, tingginya tingkat pengangguran berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat dan daya beli, yang berujung pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Salah satu penelitian menyatakan bahwa pengangguran tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi individu, tetapi juga menciptakan dampak struktural seperti meningkatnya beban sosial dan melemahnya daya saing ekonomi suatu daerah. Namun, hasil penelitian di beberapa wilayah menunjukkan bahwa hubungan pengangguran dan kemiskinan tidak selalu linier, tergantung struktur ekonomi lokal, dominasi sektor informal, dan efektivitas program ketenagakerjaan daerah (Angelia & Anitasari, 2025).

Kebijakan upah minimum juga merupakan variabel yang tidak terpisahkan dalam pembahasan mengenai kemiskinan. Secara normatif, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Simanjuntak (2018:92) menjelaskan bahwa upah minimum berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan pendapatan dan melindungi pekerja dari eksploitasi. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali menimbulkan dampak berbeda antar wilayah tergantung kemampuan industri lokal, penyebaran sektor formal dan informal, serta daya serap dunia kerja.



Dalam konteks ini, dampak upah minimum terhadap penurunan kemiskinan masih menjadi perdebatan empiris dan membutuhkan kajian berbasis data regional (Rahmawati et al., 2022).

Di Provinsi Lampung, terdapat variasi cukup besar antara daerah dalam hal IPM, tingkat pengangguran, dan standar upah minimum. Beberapa kabupaten/kota dengan tingkat IPM tinggi masih menghadapi persoalan kemiskinan kronis, sementara daerah lain dengan TPT tinggi tidak selalu menunjukkan peningkatan kemiskinan yang signifikan. Ketidakteraturan pola tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu kemiskinan di Lampung tidak dapat dianalisis secara parsial, melainkan harus dipahami melalui pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan interaksi antarvariabel pembangunan manusia, pasar tenaga kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan.

Berikut lampiran data Input Dependen dan Independen:

Tabel 1.1

Kabupaten/Kota	Tahun	IPM	TPT	UMK
Lampung Barat	2015.	64.54	3.55	1590000
	2016.	65.45	2.73	1763000
	2017.	66.06	0.96	1908447
	2018.	66.74	2.74	2168702
	2019.	67.50	1.66	2240646
	2020.	67.80	2.13	2526545
	2021.	67.90	2.83	2526545
Tanggamus	2015.	63.66	5.72	1581000
	2016.	64.41	5.08	1763000
	2017.	64.94	5.08	1908447
	2018.	65.67	2.21	2074673
	2019.	66.37	2.96	2240646
	2020.	66.42	2.96	2432001
	2021.	66.65	2.93	2432001
Lampung Selatan	2015.	65.22	5.38	1595000
	2016.	66.19	5.72	1800500
	2017.	66.95	4.80	1908447
	2018.	67.68	4.49	2074673
	2019.	68.22	4.68	2342848
	2020.	68.36	5.19	2567168
	2021.	68.49	5.27	2651885
Lampung Timur	2015.	67.10	4.49	1581000
	2016.	67.88	4.74	1763100
	2017.	68.05	3.89	1908555
	2018.	69.04	3.80	2074673
	2019.	69.34	2.70	2241406
	2020.	69.37	2.64	2432150
	2021.	69.66	3.05	2432150
Lampung Tengah	2015.	67.61	2.94	1588000
	2016.	68.33	2.72	1770650
	2017.	68.95	3.08	1916696
	2018.	69.73	2.51	2074673

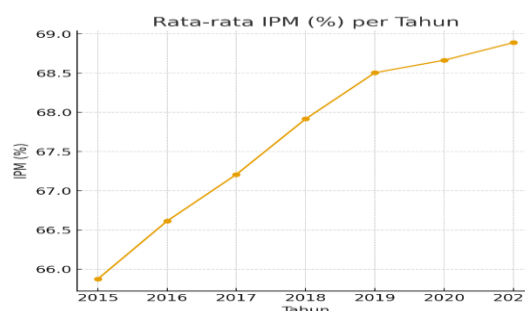


	2019.	70.04	2.61	2250957
	2020.	70.16	4.22	2432001
	2021.	70.23	4.31	2442513
Lampung Utara	2015.	65.20	7.62	1581000
	2016.	65.95	6.55	1763000
	2017.	66.58	5.62	1921670
	2018.	67.17	4.83	2074673
	2019.	67.63	5.11	2240646
	2020.	67.67	5.34	2461850
	2021.	67.89	6.14	2461850
Way Kanan	2015.	65.18	3.53	1588500
	2016.	65.74	3.44	1763000
	2017.	65.97	2.88	1950000
	2018.	66.63	4.42	2160000
	2019.	67.19	3.59	2333448
	2020.	67.44	3.56	2588911
	2021.	67.57	3.36	2645837
Tulang Bawang	2015.	66.08	5.29	1588500
	2016.	66.74	4.70	1771200
	2017.	67.07	3.47	1917324
	2018.	67.70	3.52	2074673
	2019.	68.23	4.01	2240646
	2020.	68.52	4.84	2443313
	2021.	68.73	4.10	2443313
Pesawaran	2015.	62.70	7.27	1581000
	2016.	63.47	7.92	1763000
	2017.	64.43	5.73	1908447
	2018.	64.97	4.63	2074673
	2019.	65.75	4.41	2240646
	2020.	65.79	4.64	2432001
	2021.	66.14	4.19	2432001
Pringsewu	2015.	67.55	3.85	1581000
	2016.	68.26	3.18	1763000
	2017.	68.61	4.63	1908447
	2018.	69.42	4.13	2074673
	2019.	69.97	4.92	2240646
	2020.	70.30	5.77	2432001
	2021.	70.45	4.85	2432001
Mesuji	2015.	59.79	5.06	1581000
	2016.	60.72	2.90	1581000
	2017.	61.87	0.65	1908447
	2018.	62.88	3.76	2074673
	2019.	63.52	3.61	2240646
	2020.	63.63	3.71	2588911
	2021.	64.04	3.42	2673569
Tulang Bawang Barat	2015.	63.01	2.61	1581000
	2016.	63.77	3.83	1792100



	2017.	64.58	1.86	1939948
	2018.	65.30	2.95	2074673
	2019.	65.93	3.57	2240646
	2020.	65.97	3.46	2472144
	2021.	66.22	3.35	2472144
Pesisir Barat	2015.	60.55	5.14	1581000
	2016.	61.50	4.43	1763000
	2017.	62.20	2.71	1908447
	2018.	62.96	1.87	2074673
	2019.	63.79	3.25	2240646
	2020.	63.91	3.41	2432001
	2021.	64.30	3.08	2432001
Bandar Lampung	2015.	74.81	8.51	1649500
	2016.	75.34	8.40	1870000
	2017.	75.98	8.10	2054365
	2018.	76.63	7.27	2263390
	2019.	77.33	7.15	2445141
	2020.	77.44	8.79	2653222
	2021.	77.58	8.85	2739983
Metro	2015.	75.10	5.12	1582000
	2016.	75.45	4.68	1764000
	2017.	75.87	4.64	1909530
	2018.	76.22	5.79	2075850
	2019.	76.77	5.12	2242540
	2020.	77.19	5.40	2433381
	2021.	77.49	5.00	2433381

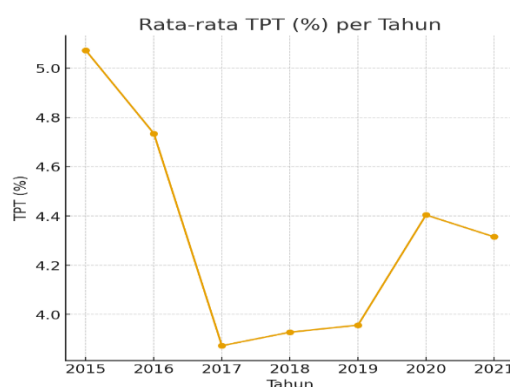
Penelitian mengenai hubungan IPM, TPT, dan upah minimum terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan di tingkat nasional maupun provinsi lain, namun penelitian dengan fokus spesifik pada Provinsi Lampung masih terbatas. Beberapa studi menggunakan pendekatan regresi panel untuk melihat pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel dapat berbeda tergantung struktur ekonomi dan konteks wilayah. Hal ini menegaskan urgensi penelitian yang secara khusus menganalisis Kabupaten/Kota di Lampung untuk menyediakan bukti empiris yang sesuai dengan karakteristik local (Down et al., 2025).



Gambar 1.1 Rata-rata IPM (%) Tahun 2015-2021.

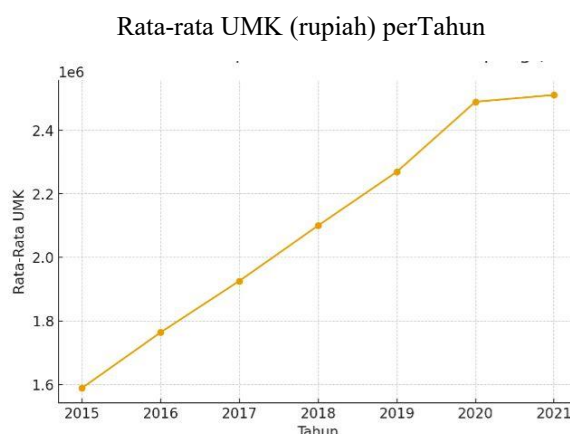


Berdasarkan grafik IPM, terlihat bahwa tren pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat yang menjadi komponen utama penyusun IPM. Kenaikan ini juga menunjukkan bahwa program pembangunan daerah, termasuk peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, mulai memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tren ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Nugroho, 2016).



Gambar 1.2 Rata-rata TPT (%) Tahun 2015-2021.

Grafik TPT diatas menunjukkan pola fluktuatif dari tahun ke tahun, di mana terjadi penurunan pada periode tertentu namun kembali meningkat pada tahun berikutnya. Pola ini mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur industri, kebijakan ketenagakerjaan, serta kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan sektor informal dan formal mengalami tekanan signifikan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak selalu secara langsung menurunkan angka pengangguran apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja produktif dan relevansi kompetensi dengan kebutuhan pasar (Muslim, 2014).



Gambar 1.3 Rata-rata UMK (rupiah) Tahun 2015-2021.

Grafik rata-rata UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015–2021 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, dimulai dari sekitar Rp1,58 juta pada 2015 hingga



mencapai Rp2,51 juta pada 2021. Kenaikan terbesar terjadi pada periode 2019–2020 yang mencerminkan dorongan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi serta penyesuaian formula UMK nasional, sementara tahun 2020–2021 menunjukkan kenaikan yang lebih lambat akibat dampak pandemi COVID-19 pada aktivitas ekonomi dan kemampuan usaha menyesuaikan upah. Secara keseluruhan, kenaikan UMK ini menunjukkan peningkatan daya beli dan standar hidup pekerja, namun juga berpotensi menambah beban biaya produksi bagi perusahaan, terutama UMKM (Hohberg & Lay, 2015).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kebijakan yang berbasis bukti dan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan di Lampung.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis asosiatif untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antarvariabel secara empiris dan terukur. Bahan penelitian berupa data sekunder, sedangkan alat penelitian meliputi perangkat komputer, Microsoft Excel untuk pengolahan data awal, dan software EViews 12 sebagai alat utama analisis ekonometrika.

Lokasi penelitian ini meliputi seluruh 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yang dipilih berdasarkan ketersediaan data dan relevansi kebijakan daerah terkait pembangunan manusia, tenaga kerja, dan ketetapan upah minimum. Pemilihan Lampung sebagai lokasi studi didasarkan pada fenomena empiris bahwa provinsi ini masih menghadapi ketimpangan kesejahteraan dan tingginya variasi tingkat kemiskinan antarwilayah. Hal ini penting untuk dikaji karena meskipun IPM cenderung meningkat setiap tahun, fenomena kemiskinan dan pengangguran masih tetap terjadi di beberapa daerah, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Jenis data yang digunakan adalah data panel (pooled data) yang merupakan kombinasi data time series dan cross section selama periode 5 tahun terakhir sesuai ketersediaan data pada sumber resmi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi Buku Statistik Provinsi Lampung, data Upah Minimum Provinsi (UMP/UMK), serta dokumen statistik regional lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan penelusuran sumber resmi melalui portal digital pemerintah.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Prosedur analisis dilakukan melalui:

1. Statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan data.
2. Estimasi model panel: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).



3. Pemilihan model terbaik melalui uji statistik: Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM).
4. Uji asumsi klasik: normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
5. Analisis inferensial dan pengujian hipotesis.

Model empiris dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

1. Y_{it} = Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota ke-i pada tahun ke-t
2. IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia
3. TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka
4. UMK_{it} = Upah Minimum Kabupaten/Kota
5. $\beta_0 \dots \beta_3$ = koefisien regresi
6. ε_{it} = error term

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap tingkat kemiskinan dan uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel bebas. Nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Fokus analisis diarahkan pada sejauh mana peningkatan kualitas sumber daya manusia, kondisi pasar tenaga kerja, serta penerapan kebijakan upah minimum mampu memengaruhi penurunan kemiskinan di masing-masing daerah. Dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini diharapkan memberikan temuan empiris yang kuat mengenai variabel-variabel yang paling menentukan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan sekaligus menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Pemilihan Model

1. Hasil Uji Chow

Tabel 1.2

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	82.121658	(14,88)	0.0000



Cross-section Chi-square	277.585968	14	0.0000
--------------------------	------------	----	--------

Nilai Prob 0,0000 < 0,05, Maka yang terpilih adalah model FEM.

2. Hasil Uji Hausman

Tabel 1.3

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

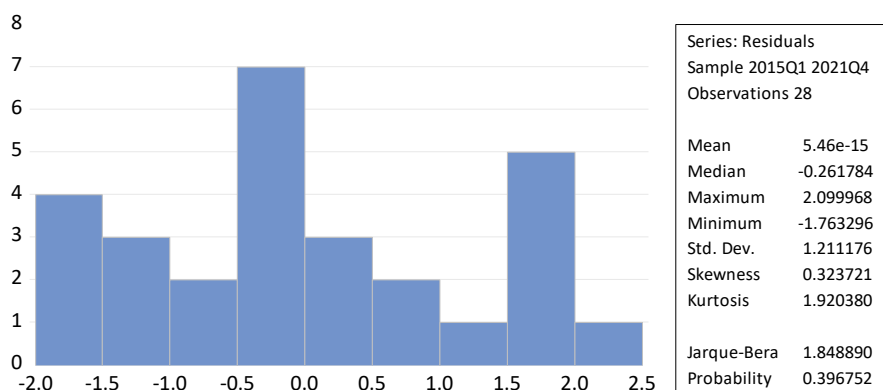
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1053.096941	2	0.0000

Nilai Prob 0,0000 < 0,05, maka yang terpilih adalah model FEM.

Berdasarkan kedua uji tersebut yang telah dilakukan, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman, diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas pada Uji Chow sebesar 0.0000 untuk Cross-section F maupun Cross-section Chi-square, yang menunjukkan adanya penolakan terhadap model Common Effect dan mengarahkan pemilihan pada model Fixed Effect. Hasil ini kemudian dikonfirmasi kembali melalui Uji Hausman yang juga menghasilkan probabilitas 0.0000, sehingga model Random Effect dinyatakan tidak layak digunakan karena tidak memenuhi kriteria konsistensi. Dengan demikian, kedua uji tersebut sama-sama mengarah pada keputusan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Oleh karena model final sudah ditentukan oleh kedua uji tersebut, maka Uji Lagrange Multiplier (LM) tidak perlu dilakukan, karena uji LM hanya digunakan apabila Uji Chow memilih Common Effect untuk kemudian dibandingkan dengan Random Effect. Dalam penelitian ini, baik Common Effect maupun Random Effect telah dieliminasi, sehingga pemilihan model berhenti pada FEM tanpa memerlukan pengujian tambahan.

3. Uji Normalitas

Tabel 1.4



Berdasarkan pengujian normalitas dengan statistik Jarque-Bera, diperoleh nilai JB sebesar 1,848890 dengan probability 0,396752. Karena nilai tersebut berada di atas tingkat signifikansi (>0,05) residual dalam model dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini



mengindikasikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga residual pada model regresi panel telah memenuhi kriteria validitas dan model dapat dianalisis lebih lanjut tanpa memerlukan transformasi data maupun penyesuaian teknik estimasi.

4. Uji Multikolinearitas

Tabel 1.5

Sample: 2015Q1 2021Q4

Included observations: 28

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.952405	69.85237	NA
TPT	0.038158	10.50952	1.137594
UMK	5.85E-13	46.30696	1.137594

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas menggunakan nilai *Centered VIF*, diperoleh bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *VIF* yang berada di bawah batas toleransi umum, yaitu < 10 . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi linear yang kuat di antara variabel-variabel independen dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas, sehingga seluruh variabel independen layak untuk digunakan dalam analisis regresi.

5. Uji heteroskedastisitas

Tabel 1.6

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.514430	Prob. F(2,25)	0.6040
Obs*R-squared	1.106776	Prob. Chi-Square(2)	0.5750
Scaled explained SS	0.406032	Prob. Chi-Square(2)	0.8163

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey, diperoleh nilai Prob. F (0.6040), Prob. Chi-Square pada Obs*R-squared (0.5750), dan Prob. Chi-Square pada Scaled Explained SS (0.8163). Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa gagal menolak H_0 , di mana H_0 menyatakan bahwa model memiliki varians residual yang konstan atau bersifat homoskedastis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga model layak digunakan karena varians error antar pengamatan bersifat stabil.



6. Uji Autokorelasi

Tabel 1.7

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.834365	Prob. F(2,23)	0.4561
Obs*R-squared	2.275220	Prob. Chi-Square(2)	0.3206

Hasil pengujian autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa nilai Prob. F sebesar 0.4561 dan Prob. Chi-Square sebesar 0.3206, keduanya berada di atas taraf signifikansi 0,05. Kondisi ini menandakan bahwa hipotesis nol, yaitu tidak adanya autokorelasi hingga lag ke-2, tidak dapat ditolak. Dengan demikian, residual dalam model dinyatakan bebas dari autokorelasi, sehingga model regresi dapat dianggap stabil dan valid untuk digunakan dalam tahap analisis berikutnya tanpa memerlukan perbaikan atas masalah serial correlation.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM dan upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan sumber daya manusia dan stabilitas pendapatan masyarakat pekerja merupakan faktor yang paling menentukan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ketidaksignifikannya TPT mengindikasikan bahwa perubahan angka pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga di wilayah penelitian karena struktur ekonomi daerah berbeda-beda.

IPM terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan produktif. Secara teoretis, peningkatan IPM akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan mengurangi risiko kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa daerah dengan peningkatan IPM cenderung menunjukkan penurunan kemiskinan karena perbaikan kualitas manusia meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat miskin (Anita & Ratnasih, 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolok ukur luas untuk menilai tingkat pembangunan nasional berdasarkan harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan hasil keselamatan jalan raya di 27 negara Uni Eropa dari tahun 2005 hingga 2020. Temuan utama menunjukkan bahwa secara konsisten, IPM yang lebih tinggi berkorelasi dengan tingkat fatalitas yang lebih rendah (diukur per 100.000 penduduk dan per 10.000 kendaraan). Namun, hubungan ini menjadi non-linear atau tidak lagi langsung setelah ambang IPM tertentu (sekitar 0,90), menandakan adanya dataran kinerja (performance plateau) pada sistem yang sudah sangat matang atau maju. Studi ini menyimpulkan bahwa mengurangi fatalitas lalu lintas



memerlukan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi dan juga menuntut kapasitas institusional yang efektif, kebijakan yang terintegrasi, dan norma keselamatan yang tertanam secara budaya (Al-mahamid, 2025).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diartikan sebagai alat yang sangat diperlukan untuk memahami kondisi social ekonomi dan mengidentifikasi disparitas regional di dalam negara, khususnya di distrik-distrik West Bengal, India. IPM adalah indeks gabungan yang mengukur kualitas hidup dengan menggabungkan tiga indikator dasar: harapan hidup, capaian pendidikan, dan PNB per kapita. Dalam konteks West Bengal, penelitian ini menggunakan IPM sub-nasional untuk memetakan kesenjangan, menemukan bahwa disparitas spasial dalam IPM (menggunakan metode UNDP) telah meningkat. Lebih lanjut, hasil regresi spasial menunjukkan bahwa tingkat IPM regional dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti proporsi populasi kelas sosial terbelakang dan tingkat urbanisasi. Oleh karena itu, IPM sub-nasional menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang ditargetkan untuk mendorong inklusi sosial dan urbanisasi guna mengurangi ketidakseimbangan regional (Dey et al., 2024).

Tidak signifikannya pengaruh TPT terhadap kemiskinan dalam penelitian ini disebabkan oleh karakteristik ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor informal. Banyak tenaga kerja memperoleh pendapatan dari pekerjaan informal meskipun secara statistik tercatat sebagai pengangguran, sehingga fluktuasi TPT tidak secara langsung meningkatkan kemiskinan. Selain itu, beberapa daerah dengan TPT tinggi justru memiliki jumlah penduduk miskin rendah karena tersedianya lapangan kerja mandiri berbasis perdagangan dan jasa, terutama pada wilayah urban. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa dampak pengangguran terhadap kemiskinan bergantung pada struktur ekonomi dan daya serap sektor informal suatu wilayah (Milik et al., 2020).

Prediksi Tingkat Pengangguran di 23 negara maju dan berteknologi tinggi selama periode 1998–2016 menggunakan metodologi canggih Artificial Neural Networks (ANN) yang diperkuat dengan uji genetika, dengan tujuan menghasilkan perkiraan yang sangat akurat. Temuan utama menunjukkan bahwa variabel-variabel yang memiliki peran signifikan dalam memperkirakan tingkat pengangguran adalah Produk Domestik Bruto (PDB), produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan populasi, dan inovasi Kecerdasan Buatan (AI). Metode ini membuktikan keefektifannya dalam menyediakan prakiraan yang unggul, sementara variabel inflasi ditemukan hanya memainkan peran sekunder dalam memengaruhi tingkat pengangguran di negara-negara yang diteliti (Magazzino et al., 2025).

Disalah satu negara tepat nya di Portugal terdapat system Inovasi Data Cepat untuk Pengangguran atau disebut juga dengan Google Trends sebagai Mata-Mata Pasar Kerja untuk mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Portugal. Karena data resmi pusat sering terlambat dua hingga tiga bulan, para peneliti menggunakan data harian dari Google Trends (GT) yaitu tren pencarian masyarakat terhadap kata kunci seperti "lowongan kerja" atau "pengangguran" sebagai indikator dini. Dengan teknik khusus, mereka membuktikan bahwa fluktuasi pencarian di Google mampu memprediksi angka TPT bulanan secara *real-time* dengan akurasi tinggi, bahkan selama gejolak besar seperti pandemi. Singkatnya, jurnal ini menunjukkan bahwa "kecemasan" publik di mesin pencari dapat menjadi alat intelijen yang cepat dan murah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsive (Costa et al., 2024).



Dampak aliran imigrasi dan kebijakan fiskal terhadap Tingkat Pengangguran di negara-negara Uni Eropa selama periode 1991-2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan populasi dengan tingkat pengangguran, yang berarti peningkatan populasi cenderung meningkatkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, pajak atas keuntungan, dan jumlah imigran menunjukkan asosiasi negatif dengan tingkat pengangguran. Studi ini menyimpulkan bahwa faktor yang paling signifikan memengaruhi tingkat pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi, sementara dampak dari aliran imigran sendiri terhadap tingkat pengangguran keseluruhan terbukti sangat lemah (Moridian et al., 2024).

Upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena kenaikan upah meningkatkan pendapatan penduduk berpenghasilan rendah, sehingga memperkuat daya beli dan menurunkan risiko kemiskinan. Efektivitas kebijakan upah terutama dirasakan pada keluarga miskin yang bergantung pada pendapatan pekerja dengan penghasilan minimum. Di sejumlah negara, peningkatan UMK terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga rentan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi, termasuk memungkinkan mereka keluar dari kemiskinan. Temuan ini mendukung bahwa kebijakan pengupahan dapat menjadi alat strategis dalam mengurangi kemiskinan apabila dapat diberlakukan secara merata di sektor formal maupun informal (José M. Arranz, 2025).

Tak hanya itu, upah minimum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, ketika upah minimum meningkat, jumlah tenaga kerja yang terserap juga cenderung meningkat karena kenaikan upah dapat mendorong produktivitas, memperkuat daya beli, dan memperluas aktivitas ekonomi. Sebaliknya, inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga fluktuasi harga tidak secara langsung menentukan besar-kecilnya jumlah tenaga kerja yang bekerja. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum berperan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara nasional (Sari & Hartono, 2020).

Upah Minimum melampaui dampak ekonomi, berpengaruh terhadap Kesehatan, kesejahteraan, subjektif pekerja, dan berketerampilan rendah. Di 87 negara, menggunakan data global dari Gallup World Poll (2009–2020). Temuan penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa kenaikan Upah Minimum memberikan manfaat positif terhadap kesehatan secara keseluruhan yang dilaporkan sendiri oleh pekerja (misalnya, peningkatan kesehatan yang dirasakan dan penurunan risiko obesitas), serta meningkatkan dimensi tertentu dari **kesejahteraan subjektif** (seperti emosi positif, kepuasan hidup, dan penurunan perasaan khawatir). Secara spesifik, diperkirakan kenaikan Upah Minimum sebesar 10% dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja berketerampilan rendah (Sotirakopoulos et al., 2025).

Penelitian di Spanyol menganalisis pada Januari 2019 bahwa, kenaikan Upah Minimum terhadap pendapatan rumah tangga dan tingkat kemiskinan, dengan mengambil kasus kenaikan signifikan sebesar 21,6% (secara riil). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerima upah minimum sebagian besar terkonsentrasi pada rumah tangga dengan pendapatan di sepertiga terbawah dari distribusi pendapatan keluarga. Melalui teknik *propensity score difference-in-differences* (DID), penelitian ini membuktikan bahwa kenaikan upah minimum tersebut secara efektif berkontribusi pada peningkatan tingkat pendapatan dan meningkatkan kemungkinan keluar



dari kemiskinan moneter bagi rumah tangga yang memiliki pekerja bergaji minimum, dibandingkan dengan rumah tangga lain yang tidak terdampak langsung oleh kenaikan tersebut (Arranz & García-Serrano, 2025).

Jika dikaitkan konteks regional, hasil penelitian mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Lampung tidak cukup mengandalkan pertumbuhan IPM semata, tetapi juga membutuhkan stabilitas pendapatan tenaga kerja melalui kebijakan pengupahan yang adil dan penguatan akses terhadap pekerjaan produktif. Perbedaan karakteristik ekonomi antar daerah menyebabkan respons variabel pembangunan tidak seragam, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan di Lampung harus menyesuaikan kondisi struktur ekonomi dan peluang kerja tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, integrasi antara peningkatan kualitas manusia, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan upah berkelanjutan diyakini sebagai strategi paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan secara konsisten di Provinsi Lampung (Angelia & Anitasari, 2025).

Temuan bahwa peningkatan IPM menurunkan kemiskinan sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan manusia menciptakan peningkatan kemampuan produktif masyarakat, sehingga memberikan peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan layak. Daerah dengan kualitas pendidikan dan kesehatan lebih baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi karena masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Studi internasional juga memperkuat bukti bahwa negara dengan investasi tinggi pada pembangunan manusia mengalami penurunan kemiskinan secara berkelanjutan karena peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya beli rumah tangga (Personal & Archive, 2022).

Kenaikan upah minimum berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan konsumsi dan daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketika upah minimum naik, rumah tangga yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan memiliki peluang keluar dari kondisi miskin karena pendapatan kerja menjadi lebih stabil dan mencukupi kebutuhan dasar. Bukti internasional menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara efektif mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ketika diterapkan secara tepat pada sektor tenaga kerja formal dan informal (No et al., 2020).

Pengaruh TPT yang tidak signifikan terhadap kemiskinan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Lampung masih mampu mempertahankan pendapatan melalui kerja mandiri, sektor informal, ataupun usaha keluarga sehingga stagnasi pengangguran tidak otomatis memicu peningkatan kemiskinan. Kondisi ini menandakan bahwa ketahanan ekonomi rumah tangga di Lampung bersumber dari diversifikasi sumber pendapatan, bukan hanya pekerjaan formal. Studi nasional juga menunjukkan bahwa daerah dengan porsi sektor informal besar cenderung memiliki ketahanan ekonomi sosial yang lebih baik meskipun tingkat pengangguran tercatat tinggi secara statistik (Alliyah et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, artinya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli, dan pendapatan masyarakat pekerja berkontribusi langsung dalam menurunkan jumlah penduduk



miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan kebijakan pengupahan merupakan instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan. Sementara itu, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, menandakan bahwa fluktuasi pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kemiskinan karena mayoritas masyarakat masih dapat bertahan melalui sektor informal meski tidak bekerja pada sektor formal.

Secara simultan, IPM, TPT, dan Upah Minimum berpengaruh bersama terhadap tingkat kemiskinan, namun kekuatan pengaruh terbesar berasal dari IPM dan Upah Minimum sehingga kedua variabel ini menjadi faktor paling menentukan dalam penurunan kemiskinan di Lampung. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif memerlukan integrasi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan kebijakan upah minimum yang adil dan merata, serta perluasan kesempatan kerja produktif. Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Provinsi Lampung.

Selain itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Provinsi Lampung. Peningkatan IPM dan penyesuaian upah minimum perlu diiringi dengan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, serta penguatan dunia kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan di seluruh wilayah. Pemerintah juga perlu memperluas pelatihan berbasis kompetensi dan memperkuat kemitraan dengan sektor industri untuk mempercepat transisi tenaga kerja informal ke sektor formal. Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan berbasis bukti, pengentasan kemiskinan di Lampung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-mahamid, H. (2025). A comparative analysis of the human development index and road safety outcomes in the European Union. *European Transport Studies*, 2(September), 100041. <https://doi.org/10.1016/j.ets.2025.100041>
- Alliyah, E. M., Ariwibowo, P., Nizma, M., & Pgri, U. I. (2024). *Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005-2022*. 16, 279–287.
- Angelia, F., & Anitasari, M. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2022. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2796–2806. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1559>
- Anita, T., & Ratnasih, C. (2023). *Determinants of Poverty in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327347>
- Anita, T., Ratnasih, C., & Meirinaldi, M. (2023). *Determinants of Poverty in Indonesia*. 11(03), 1930–1936. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327347>
- Arranz, J. M., & García-Serrano, C. (2025). Assessing the impact of an increase in the minimum wage on household income and poverty. *Social Science Research*, 127(January). <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2025.103143>
- Costa, E. A., Silva, M. E., & Galvão, A. B. (2024). Real-time nowcasting the monthly unemployment rates with daily Google Trends data. *Socio-Economic Planning Sciences*, 95(July 2023). <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101963>



- Dey, S., Ray, J., & Majumder, R. (2024). Spatial inequality in sub-national human development index: A case study of West Bengal districts. *Sustainable Futures*, 8(October). <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2024.100330>
- Down, S., Read, T. O., & Article, T. (2025). *Analysis of the influence of the human development index (HDI), unemployment and minimum wages on poverty during 2004-2022*. 11(3).
- Hohberg, M., & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor and Development*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0036-4>
- José M. Arranz. (2025). *Assessing the impact of an increase in the minimum wage on household income and poverty*.
- Magazzino, C., Mele, M., & Mutascu, M. (2025). An artificial neural network experiment on the prediction of the unemployment rate. *Journal of Policy Modeling*, 47(3), 471–491. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.10.004>
- Milik, H. A. K., Tanah, A., Kasus, S., & Kabupaten, P. (2020). *No Title*.
- Moridian, A., Radulescu, M., Kumar, P., Radu, M. T., & Mohammad, J. (2024). New insights on immigration, fiscal policy and unemployment rate in EU countries – A quantile regression approach. *Heliyon*, 10(13), e33519. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33519>
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka Dan Determinannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Volume 15, Nomor 2, 15(2), 171–181. <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/1234/1292>
- No, I. Z. A. D. P., Green, C., Mcvicar, D., & Green, C. (2020). *DISCUSSION PAPER SERIES Is Precarious Employment Bad for Worker Health ? The Case of Zero Hours Contracts in the UK Egidio Farina Is Precarious Employment Bad for Worker Health ? The Case of Zero Hours Contracts in the UK Egidio Farina*. 13116.
- Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33105/itr.v1i1.57>
- Personal, M., & Archive, R. (2022). *Munich Personal RePEc Archive An empirical study on the dynamic effects of fiscal shock on the economy of*. 113917.
- Rahmawati, N., Prasetyanto, P. K., & Islami, F. S. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Regional (UMR), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 19–31. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.23358>
- Rusdi, M. (2023). Pengaruh Index Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 971–981.
- Sari, A., & Hartono, D. (2020). Analisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 45–56.
- Sotirakopoulos, P., Guven, C., Ulker, A., & Graham, C. (2025). The impact of minimum wages on overall health and well-being: Global evidence from the Gallup World Poll. *Social Science and Medicine*, 375(April), 118064. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118064>